

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia¹. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut World Bank, salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).²

Tabel. 1.1

Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2016

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata Rata
Pandeglang	11.14	9.80	9.28	10.25	9.50	10.43	9.67	10.01

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 226.

²Novi Astika Sari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Periode 1999-2003," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. V, No. 12 (Desember 2016), 149.

Lebak	10.38	9.20	8.63	9.50	9.17	9.97	8.71	9.37
Tangerang	7.18	6.42	5.71	5.78	5.26	5.71	5.29	5.90
Serang	6.34	5.63	5.28	5.02	4.87	5.09	4.58	5.26
Kota Tangerang	6.88	6.14	5.56	5.26	4.91	5.04	4.94	5.53
Kota Cilegon	4.46	3.98	3.82	3.99	3.81	4.10	3.57	3.91
Kota Serang	7.03	6.25	5.70	5.92	5.70	6.28	5.58	6.06
Kota TangSel	1.67	1.50	1.33	1.75	1.68	1.69	1.67	1.61
Banten	7.02	6.62	5.71	5.89	5.51	5.90	5.42	6.01

Sumber: BPS Provinsi Banten

Fenomena yang dialami di Provinsi Banten, persentase penduduk miskin yang cukup rendah. Namun, kalau dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota memiliki tingkat kemiskinan belum merata. Seperti yang dilihat dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 8 kabupaten/kota di Banten masih tidak merata, dan sebagian tingkat kemiskinannya masih tinggi. Perbedaan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Banten periode 2010-2016 cukup mencolok, misalnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (10 persen) memiliki tingkat kemiskinan sangat tinggi dibandingkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan sangat rendah (1.61 persen) rangenya kurang lebih 8 persen.

Ini mengindikasikan usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan belum merata ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi

Banten. Untuk itu perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten/kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak di Indonesia. Secara resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 14.327 perusahaan yang ada di Provinsi Banten mulai dari pabrik baja, semen, gas, kabel dan lain-lain.

Jumlah yang banyak tersebut seharusnya dapat menyerap banyak tenaga kerja yang ada di Provinsi Banten dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun ironisnya, tingkat pengangguran di Provinsi Banten menduduki peringkat keempat tertinggi di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten tertinggi keempat yakni 7,75 persen. Urutan pertama Kalimantan Timur 8,55 persen, urutan kedua Jawa Barat 8,49 persen dan urutan ketiga Maluku 7,77 persen.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal tersebut disebabkan karena angka kompetensi dan tingkat pendidikan masyarakat Banten yang masih rendah. Di Banten 7,55 persen dari total jumlah penduduk 11 juta. Idealnya, angka pengangguran dapat ditekan. Hal itu karena pendidikan formal yang dicapai masyarakat Banten belum mampu menjawab tantangan pasar. Lemahnya kompetensi masyarakat Banten terlihat pada lulusan sekolah penduduknya yang rata-rata hanya sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan kurang. Sedikitnya ada 65 persen masyarakat Banten yang belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA dan kuliah³.

Tabel 1.2

**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2010-2016 (Tahun)**

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDG	6.33	6.38	6.43	6.44	6.45	6.60	6.62
LBK	5.34	5.58	5.70	5.81	5.84	5.86	6.19
TGR	7.85	7.96	8.07	8.18	8.20	8.22	8.23
SRG	6.07	6.31	6.75	6.65	6.69	6.90	6.98
Kot. TGR	9.64	9.75	9.76	9.82	10.20	10.20	10.28
Kot. Cilegon	8.71	8.93	9.29	9.60	9.66	9.67	9.68
Kot. Serang	8.32	8.39	8.48	8.56	8.58	8.59	8.60
Kot. TangSel	10.15	10.87	11.9	11.48	11.56	11.57	11.58

³ ” 14.327 Perusahaan di Banten, Tapi Pengangguran 4 Besar Nasional,” Jakarta, 21 Jul., 2017. <https://www.jawapos.com>.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan Tabel 1.2, Rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten Tahun 2010-2016 mengalami sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, jika dilihat dimasing-masing daerah terdapat perbedaan yang signifikan, ini mengindikasikan usaha pemerintah dalam meningkatkan rata-rata lama sekola belum merata ke seluruh kabupaten/kota.

Pendidikan merupakan sebuah pionir dalam berkembangnya pembangunan suatu bangsa sehingga menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika dunia pendidikan dalam suatu bangsa tidak baik, maka pembangunan bangsa tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, semakin meningkatnya pendidikan penduduk akan meningkatkan produktifitasnya, semakin meningkat produktifitas akan semakin meningkatkan pendapatannya sehingga penduduk akan semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup, semakin terpenuhinya kebutuhan hidup akan mengakibatkan kemiskinan menurun.

Ada beberapa program pemerintah dalam membantu masyarakat yang tergolong miskin untuk melanjutkan sekolah, salah satunya adalah program Beasiswa Bidikmisi. Beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu dalam ekonomi, namun memiliki prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Tujuan dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin, sehingga dengan penguasaan pendidikan tinggi bisa memutus rantai kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian pada kabupaten/kota di provinsi Banten dengan variabel jumlah penduduk, pendidikan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN 2010-2016”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016 secara agregat mengalami penurunan. Namun, jika dilihat disetiap

kabupaten/kota tingkat kemiskinannya cukup tinggi dan rangnya berbeda jauh.

2. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten tahun 2010-2016 cukup rendah bila dibandingkan dengan provinsi lain. Sehingga kualitas sumber daya manusianya rendah, sehingga kurang memiliki kemampuan dan daya saing.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten 2010-2016?

D. Pembatasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar fokus pada permasalahan tertentu. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten 2010-2016.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten 2010-2016.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten 2010-2016.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat diuji kebenarannya terkait masalah hubungan antar variabel makro terhadap masalah kemiskinan.
2. Bagi pengambil keputusan, dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi kebijakan dalam pembangunan ekonomi.
3. Bagi peneliti, dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman terkait masalah-masalah ekonomi pembangunan khususnya dalam bidang kemiskinan.

G. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan dapat didefinisikan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskan keperluan-keperluan dasar materialnya, misalnya sandang, pangan dan papan. Menurut John Friedman, Kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi: *Pertama*, modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. *Kedua*, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. *Ketiga*, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. *Keempat*, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. *Kelima*, informasi yang berguna untuk kehidupan⁴.

Dilihat dari faktor penyebab kemiskinan. Menurut Todaro, menyebutkan bahwa kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: perbedaan geografis, jumlah penduduk dan pendapatan, perbedaan kekayaan sumber daya alam dan

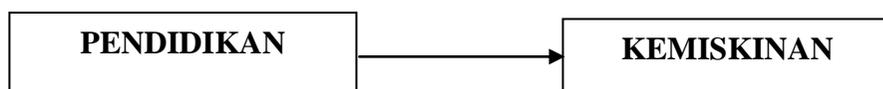
⁴Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, (Malang: In-Trans Publising, 2013), 2-3.

kualitas sumber daya manusia, perbedaan peranan sector swasta dan negara, perbedaan struktur industri dan ketergantungan pada kekuatan ekonomi politik negara lain serta perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri⁵.

Pendidikan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia. Di *era knowledge based* seperti sekarang ini, kekayaan sejati suatu negara tidak lagi terletak pada kepemilikan sumber daya alam, tetapi juga kualitas SDM. Jika hambatan struktural diselesaikan namun pada saat yang sama tidak berhasil meningkatkan SDM, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sulit dilakukan. Pandangan ini ditegaskan oleh seorang yang bernama Barro Lee⁶.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar 1.1, keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang akan

⁵Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Jakarta: KPG, 2014), 42.

⁶Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni*, 43.

meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu bab I. Pendahuluan, bab II. Kajian pustaka, bab III. Metode penulisan, bab IV. Pembahasan hasil penulisan, dan bab V. Kesimpulan dan saran. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut :

Pada bab pertama: Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua: Kajian Teoritis, membahas tentang kajian pustaka, meliputi pengertian Kemiskinan, bentuk-bentuk kemiskinan, penyebab kemiskinan, kemiskinan dalam pandangan islam, pengertian

pendidikan, pentingnya pendidikan, dan pendidikan dengan tingkat kemiskinan.

Pada bab ketiga: Metodologi Penelitian, menguraikan secara rinci mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Pada bab keempat: Analisis dan Hasil Pembahasan, membahas uraian hasil penulisan berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan di sertai pembahasan analisis dan terpadu.

Pada bab Kelima: Kesimpulan dan Saran, membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka masih belum stabil dan *sustainable*. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal satu negara, yang akan berbeda dari satu negara dengan negara lain. Bank dunia mendefinisikan keadaan miskin yaitu “*Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standard across the whole society*”

Menurut antropolog Amerika, yang dikenal dengan konsep budaya kemiskinannya, Oscar Lewis, memaknai kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskan

keperluan-keperluan dasar materialnya⁷. Keperluan-keperluan dasar misalnya: sandang, pangan dan papan.

Sedangkan konsep yang dipakai BPS (Badan Pusat Statistik), kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (*basic needs approach*) yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK). Komponen dari GK adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)⁸. Tingkat kemiskinan (*Poverty rate*) adalah presentasi pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya berada pada tingkat absolute yang dinamakan garis kemiskinan (*poverty line*).⁹

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya pendapatan (*income*) suatu komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu, sering kali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya

⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makroekonomi Islam -Teori, Konsep dan Analisis-*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 226-227.

⁸Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten*, (Banten, 2016).

⁹N. Gregory Mankiw, Eusron Quah dan Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 413.

peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi, namun meliputi masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan *kemiskinan plural*.

2. Bentuk-bentuk Kemiskinan

Kalangan pemerhati kemiskinan telah mencoba memilah kemiskinan ke dalam empat bentuk, dimana masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri. Keempat bentuk tersebut diantaranya:

a. Kemiskinan Absolut

Yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah “garis kemiskinan” atau sejumlah pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan Relatif

Yaitu kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi garis kemiskinan, namun relatif rendah dibandingkan pendapatan masyarakat sekitarnya.

c. Kemiskinan Struktural

Yaitu kondisi atau situasi miskin karena pengaruh dari kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.

d. Kemiskinan Kultural

Yaitu karena mengacu pada persoalan sikap orang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau bekerja untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif; meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya¹⁰.

¹⁰ Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Belantika, 2004), 30-31

Menurut Max-Neef.¹¹, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yaitu:

- a. Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas bersih mahal.
- b. Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak kepemilikan tanah.
- c. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan, kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
- d. Kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.
- e. Kemiskinan identitas, terbatasnya pembauran atas kelompok sosial, terfragmentasi.
- f. Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas.

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makroekonomi Islam -Teori, Konsep dan Analisis-*, 227.

3. Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi penyebab kemiskinan dilihat dari segi ekonomi, diantaranya:

- a. Kemiskinan secara mikro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan, dan keahlian seperti yang dimiliki orang kaya.
- c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang seringkali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber pemodal yang ada.

Ketiga penyebab kemiskinan ini menurut Nurske¹² akan bermuara pada suatu teori lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Keterbelakangan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas selanjutnya akan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diterima. Dan hal ini akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi ini berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berfikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse yang mengatakan “*A poor country is poor because it is poor*”. Suatu negara miskin disebabkan oleh kondisi dimana negara tersebut adalah miskin, karena memiliki tiga hal yang menjadi penyebab kemiskinan, apabila suatu negara ingin melepaskan diri dari jerat lingkaran setan kemiskinan yang ada, maka haruslah memotong tiga penyebab kemiskinan yang ada. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

¹² M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makroekonomi Islam -Teori, Konsep dan Analisis-*, 237.

- a. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
- b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
- c. Penyebab sub-budaya (*“subcultural”*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
- d. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
- e. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Sedangkan menurut Todaro¹³, menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: perbedaan geografis, jumlah penduduk dan pendapatan, perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia (pendidikan), perbedaan peranan sektor swasta dan negara, perbedaan struktur dan derajat ketergantungan pada

42. ¹³Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*,,

kekuatan ekonomi politik negara lain serta perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan negara.

4. Ukuran Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan atas naorma-norma tertentu yang terdapat disuatu daerah. Pemilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua unsur, yaitu: *pertama*, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuahn dasar lainnya. *Kedua*, Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi. Yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari¹⁴.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dikeluarkan per kapita sebulan untuk memenuhi minimum makanan dan non makanan.

a. Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

¹⁴M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makroekonomi Islam.*, 237

GKM setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita per hari. Pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari dihitung berdasarkan 1 basket komoditi yang terdiri dari 52 jenis komoditi.

b. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)

GKNM setara dengan kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Untuk mengukur kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

c. Persentase Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel 2.1
Persentase Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Komoditi	Kota	Komoditi	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Beras	21,57	Beras	38,04
Rokok kretek filter Telur ayam ras	11,04	Rokok kretek filter	6,10
Daging ayam ras	3,56	Telur ayam ras	2,90
Mie instan	3,17	Kopi Bubuk dan instan	2,71
	3,04	Mie instan	2,47
Bukan Makanan			
Perumahan Bensin	10,97	Perumahan	9,21
Listrik Pendidikan	3,71	Bensin Listrik	1,75
Perlengkapan Mandi	3,26	Pendidikan	1,63
	2,23	Kayu Bakar	1,56
	1,57		1,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan table 2.1, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) Kota di Provinsi Banten didominasi oleh komoditi beras sebesar 21,17%, rokok kretek filter

11,04%, telur ayam ras 3.56 %, daging ayam ras 3.17%, mie instan 3,04%. Sedangkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) Desa di Provinsi Banten didominasi oleh komoditi beras sebesar 38,04%, rokok kretek filter 6,10%, telur ayam ras 2,90%, kopi bubuk dan instan 2,71% dan 2.47%. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) Kota di Provinsi Banten didominasi oleh perumahan sebesar 10,97%, bensin 3.71%, listrik 3,26%, pendidikan 2,23% dan perlengkapan mandi 1.57%. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) Desa di Provinsi Banten didominasi oleh perumahan sebesar 9,21%, bensin 1,75%, listrik 1,63%, pendidikan 1.56% dan kayu bakar 1.31%.

5. Ciri-ciri Kemiskinan

Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau kelompok orang untuk disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa sulit untuk mengklasifikasikan masyarakat menurut

garis kemiskinan. Namun, dari berbagai studi yang ada, pada dasarnya ada beberapa ciri dari kemiskinan, yaitu¹⁵:

- a. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal maupun keterampilan. Faktor produksi pada umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- b. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya untuk pelunasannya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, sudah sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak

¹⁵Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*,, 5-6.

ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolah oleh karena itu harus membantu orang tua mencari nafkah tambahan.

- d. Banyak diantara mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau walaupun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Tetapi, karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan di desa, maka banyak diantara mereka mencoba berusaha ke kota (urbanisasi) untuk mengadu nasib.
- e. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau *skill* dan pendidikan. Sedangkan kota sendiri terutama di negara

berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa tersebut. Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota. Maka proses urbanisasi di negara sedang berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri. Bahkan sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota negara sedang berkembang justru menampik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampar dalam kantong-kantong kemelaratan (*Slumps*)¹⁶.

6. Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Islam memandang baik fakir maupun miskin harus sama-sama dibantu, terlepas dari apapun definisinya secara bahasa. Fakir dalam perspektif Islam adalah suatu keadaan yang serba kekurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Misalkan seseorang yang sudah tua dan tidak memiliki tenaga untuk bekerja, maka ia dapat disebut fakir. Sedangkan miskin adalah keadaan dimana seseorang sudah

¹⁶ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, 5-6.

bekerja, tetapi masi belum mencukupi kebutuhan hidupnya, Misalkan tukang sapu jalan tinggal di kota besar seperti Jakarta dan hanya mendapatkan honor di bawah Rp. 500.000; per bulan, sementara anaknya lebih dari tiga, maka honor tersebut tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya¹⁷.

Para ulama berbeda pendapat tentang posisi atau derajat kemiskinan apabila dibandingkan dengan kekayaan. Paling tidak ada dua kelompok. *Kelompok pertama*, berpendapat bahwa kemiskinan dan kefakiran lebih baik daripada kekayaan. Diantara argumen yang diajukan adalah beberapa ayat al-Qur'an yang memuji orang-orang yang fakir, diantaranya adalah firman Allah:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٧٢﴾

(Apa yang kamu infakan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah,

¹⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makroekonomi Islam*, 233

sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi, (orang lain) tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakan, sungguh, Allah Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah:273)¹⁸.

Demikian juga ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak mengusir orang-orang miskin yang taat kepada Allah sebagai mana yang disyaratkan dalam firman-Nya:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ^ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ
عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau (berpihak) mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim (QS. Al-An'am: 52)¹⁹

Disamping argumen normatif di atas, banyak praktik beragama yang dilakukan oleh para ulama, khususnya dari

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), 822.

¹⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 179.

kalangan sufi pada masa awal dan masa pertengahan, yang memilih untuk menjadi miskin. Ungkapan yang populer di kalangan ini diantaranya adalah, “Tuhan memuliakan kemiskinan dan menjadikannya derajat khusus orang-orang miskin yang telah melepaskan semua hal yang lahir dan batin dan benar-benar menghadap hanya kepada Allah”.

Kelompok kedua, menganggap bahwa kekayaan jelas lebih utama daripada kemiskinan. Diantara argumen yang disampaikan adalah bahwa kekayaan itu adalah salah satu sifat Tuhan, Sedangkan kemiskinan tidak dapat dinisbatkan kepadanya. Disamping itu, begitu banyak ayat yang memuji orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah. Bagaimana seseorang berinfak kalam miskin?

Dari pemaparan di atas mungkin ada sementara orang yang menduga terjadi kontradiksi dalam al-Qur’an; ada ayat yang memuji kemiskinan, ada juga ayat yang memuji kekayaan. Para ulama tafsir sepakat bahwa tidak ada kontradiksi dalam al-Qur’an. Kalau ada kesan tersebut, itu disebabkan oleh kekurangan manusia dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an. Salah satu yang pasti, Allah menegaskan harta dunia itu

dijadikan sebagai ujian bagi manusia. Hal ini disebutkan dua kali dalam al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ



Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar (QS. Al-Anfal:28²⁰).

Ayat-ayat tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa al-Qur'an mendorong agar menjauhi dunia, sama sekali tidak. Karena ditemukan sekian banyak ayat yang mendorong agar manusia memaksimalkan usahanya untuk mencari karunia Allah SWT. Salah satu karunia Allah dalam hidup di dunia ini adalah harta²¹.

7. Solusi Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan berikut:

²⁰Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 243.

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), 47-50.

- a. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa: sedekah biasa (*tatawwu'*) dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul yang tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan temporer, yaitu memberikan bantuan yang langsung dirasakan oleh kaum miskin. Bentuk bantuan ini misalkan dengan pemberian sembako kepada fakir miskin, dimana bantuan tersebut langsung dapat dinikmati.
- b. Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sehingga pendekatan ini sifatnya jangka panjang dan lebih sistematis dan terencana, namun pengaruhnya tidak bisa langsung dirasakan. Bentuk bantuan pendekatan struktural misalkan adalah bantuan modal produktif atau pelatihan dan kursus yang dapat meningkatkan keterampilan

dan keahlian mereka. Model pendekatan ini berusaha untuk memotong lingkaran setan kemiskinan²².

Ada beberapa hal yang menjadi kerangka kebijaksanaan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan:

- a. Pemberdayaan usaha yang produktif.
- b. Pengadopsian strategi pertumbuhan yang berorientasikan Islam.
- c. Peraturan tentang praktek-praktek bisnis.
- d. Kesempatan yang adil.
- e. Hak memilik dan kewajiban terhadap harta kekayaan dalam Islam.
- f. Hukum-hukum warisan.
- g. Faktor kemitraaan dan fungsi pemerataan pendapatan.
- h. Pemberdayaan pemberian suka rela bagi kesejahteraan fakir miskin.
- i. Kebijakan fiskal dan moneter.
- j. Sistem jaminan sosial islam.

Mencermati beberapa kekeliruan paradigmatik penanggulangan kemiskinan, ada strategi yang harus dilakukan

²²M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makroekonomi Islam*, 245

untuk mengatasi kemiskinan. *Pertama*, karena kemiskinan bersifat multidimensional maka program pengetasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis. *Kedua*, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan lapangan kerja (*networking*), serta informasi pasar. *Ketiga*, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan

kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.

Keempat, strategi pemberdayaan.²³

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu Negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan.²⁴

UNDP (*United Nation Development Programe*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*The Ultimate End*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*Principal Means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan

²³M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Ekonomi Makroekonomi Islam.*, 247

²⁴ <http://simreg.bappenas.go.id> diakses pada hari Senin 18 Desember 2017 jam 3.15

manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.²⁵

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu standar pembangunan manusia yaitu IPM atau HDI (*Human Development Index*). IPM lebih fokus menyoroti pada hal-hal yang lebih sensitif dari pada hanya melihat pendapatan perkapita sebagai ukuran untuk menilai pembangunan ekonomi. IPM dapat menilai pembangunan di daerah disebabkan :

1. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia.
2. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.
3. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat.
4. Meskipun menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia,

²⁵ UNDP, *Human Development Report*, (New York : Oxford University Press,1995), 177

tetapi IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia. Komponen-komponen yang dilihat dalam mengukur IPM didasarkan pada komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan standar kehidupan yang layak. Penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0 – 0,10 yang terdiri dari²⁶:

1. Kategori rendah : nilai IPM 0 – 0,05
2. Kategori menengah : nilai IPM antara 0,51 – 0,79
3. Kategori tinggi : nilai IPM 0,8 – 1

C. Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang

²⁶ Kuncoro Mudrajad, *Ekonomika Indonesia*. Edisi pertama, (Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN, 2009), 135

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jalur pendidikan:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi. jenjang pendidikan formal:
 - a. Pendidikan dasar, merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. Pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

- c. Pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan lain-lain.
3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Hasil pendidikan formal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan²⁷.

D. Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu

²⁷Musa Al Junaedi., “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia*”, (Skripsi, Program Sarjana, UNDIP, Semarang, 2014), 30-34.

meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan²⁸.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa.

Landasan teori tentang pendidikan yang ada dalam penelitian ini menggunakan konsep teori menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan dimana pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam hal spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

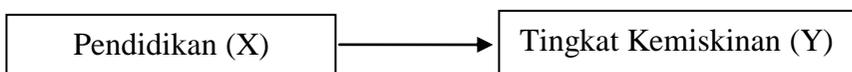
²⁸Adit Agus Prastyo, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*, (Skripsi, Program Sarjana, UNDIP, Semarang, 2010), 59-60.

kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengukuran pendidikan dalam penelitian ini menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah yang tinggi menunjukkan semakin meningkatnya kualitas tenaga kerja yang terdapat dalam suatu daerah²⁹.

E. Hubungan Antara Variabel X dengan Variabel Y

Pendidikan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM menjadi salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia. Di *era knowledge based* seperti sekarang ini, kekayaan sejati suatu negara tidak lagi terletak pada kepemilikan sumber daya alam, tetapi juga kualitas SDM. Jika hambatan struktural diselesaikan namun pada saat yang sama tidak berhasil meningkatkan SDM, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sulit dilakukan. Pandangan ini ditegaskan oleh seorang yang bernama Barro Lee³⁰.

Gambar 2.1
Hubungan Antar Variabel



²⁹Musa Al Junaedi., “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia*”, (Skripsi, Program Sarjana, UNDIP, Semarang, 2014), 35.

³⁰Nason Wahid, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, (Jakarta: KPG, 2014), 43.

Berdasarkan gambar 2.1, hubungan pendidikan dan kemiskinan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang akan meningkatkan produktifitas. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Dwi Rahmawati pada tahun 2017 dengan judul penelitian *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2010-2016*. Variabel X yang digunakan diantaranya: Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran. Sedangkan, Variabel Y yang digunakan yaitu Tingkat Kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X (Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (Tingkat

Kemiskinan)³¹. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan variabel X yang digunakan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Adit Agus Prastyo pada tahun 2010 dengan judul penelitian *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. Variabel X yang digunakan Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten/kota, Pendidikan, Pengangguran, Dummy Wilayah. Sedangkan Variabel Y yang digunakan yaitu Kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan Adjusted R² cukup tinggi yaitu 0.982677. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan³². Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan variabel X yang digunakan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Vendi Wijanarko pada tahun 2013 dengan judul penelitian *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*. Variabel X yang

³¹Kurnia Dwi Rahmawati, “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2010-2016, ” (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2017).

³²Adit Agus Prastyo, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007),” (Skripsi, Program Sarjana, FEB, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).

digunakan yaitu Curahan Jam Kerja, Pendidikan, Usia. Sedangkan Variabel Y yaitu Kemiskinan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa curahan jam kerja (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0252 terhadap kemiskinan, pendidikan (X2) memiliki nilai probabilitas 0.0000 terhadap kemiskinan, usia (X3) memiliki nilai probabilitas 0.6836 terhadap kemiskinan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel curahan jam kerja dan pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari level of significance ($\alpha = 0,05$). Sedangkan usia mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan karena nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai level of significance $\alpha = (0,05)$. Sedangkan untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan dengan nilai R² sebesar 0.766314 atau 76% dan sisanya 24% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini. Perbedaannya adalah objek penelitian dan variabel X yang digunakan.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah salah satu cara dalam statistika untuk menguji parameter populasi berdasarkan statistik sampelnya, untuk dapat diterima atau ditolak pada tingkat signifikan tertentu. Pada prinsipnya

pengujian hipotesis ini adalah membuat kesimpulan sementara untuk melakukan penyanggahan dan/atau pembenaran sementara dari permasalahan yang akan ditelaah³³. Hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

H_0 : Pendidikan *tidak berpengaruh* terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016.

H_1 : Pendidikan *berpengaruh* secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016.

³³Andi Supangat, *STATISTIKA: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametik*, (Jakarta: KENCANA, 2007), 293

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desember 2017 sampai Januari 2018 dengan tahun pengamatan dari tahun 2010-2016 untuk memperoleh data-data yang menunjukkan gambaran tentang pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten 2010-2016.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang beralamat di Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Kav H1-2, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Telp: (0253) 267027, Fax: (0253) 267026, Email: banten@bps.go.id, Website: <http://banten.bps.go.id>

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data yang dihasilkan dalam penelitian kuantitatif disajikan dalam bentuk angka-angka statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang telah dikumpulkan oleh lembaga

pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data³⁴.

2. Sumber Data

Karena jenis data yang digunakan ada data sekunder, maka peneliti mengumpulkan data dari lembaga, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten yang diunduh melalui website: <http://banten.bps.go.id>. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (*time-series data*) untuk kurun waktu tahun 2010-2016 serta data kerat lintang (*cross-section data*) yang meliputi 8 kabupaten/kota di Banten. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

C. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan sebuah penelitian dan mendapatkan data yang tepat untuk memperoleh kesimpulan secara akurat, maka dalam penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

³⁴Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 309

a. Studi Pustaka

Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian dengan bantuan buku-buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan memecahkan masalah.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang tertulis yang mengandung keterangan dan fenomena yang masih aktual yang sesuai dengan masalah penelitian³⁵.

Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan lemahnya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

³⁵Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 152.

2. Pengolahan Data

Metode analisis data ini dapat digunakan untuk mengolah data dan memprediksi hasil penelitian guna menarik kesimpulan yang masuk akal. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS 16.0.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah regresi dapat dilakukan atau tidak. Langkah-langkah dalam uji klasik adalah sebagai berikut:

1). Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasikan pada model regresi berdistribusi normal atau tidak³⁶. Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera (J-B) *Test* dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B *Test*, apabila J-B hitung < nilai X^2 (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual terdistribusi normal.

³⁶ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan-Terori dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2011), 69.

2). Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3). Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali, uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya), dimana jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*).

Jika terjadi autokorelasi gunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) yaitu dengan cara mengestimasi persamaan

regresi yang tidak mengandung masalah autokorelasi. Dengan cara mendeteksi autocorelasi melalui uji *Durbin Watson* (DW). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H0 : tidak ada autokorelasi ($r=0$)

H1 : ada autokorelasi ($r\neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidanya korelasi³⁷

Tabel 3.1
Kriteria Uji Durbin Watson³⁸

Hipotesis	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d > dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$Dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4-du < d < 4 - dl$

³⁷Imam Ghozali, *Aplikasi analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: BP UNDIP,2013), 139.

³⁸Haryadi Winda Julianita, *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 90.

Tidak ada autokorelasi negative	No desicison	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif/negative	Tidak ditolak	$Du < d < 4-du$

Apabila terjadi masalah autokorelasi, dalam penelitian ini cara mengatasi autokorelasinya dengan uji *Cochrane Orcutt*.

b. Uji Analisis Regresi Regresi Sederhana

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kasual atau variabel independen dengan satu variabel dependen.³⁹ Untuk mengukur berapa besar pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi sederhana, dengan rumus:

$$Y = a + bX + e$$

³⁹Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, 243.

Dimana:

Y : Tingkat Kemiskinan

a : Konstanta

b : Angka arah atau koefisien regresi

X : Pendidikan

e : Nilai residu

c. Uji Hipotesis

1). Uji signifikan Parameter Individu (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain itu konstan. Dengan tingkat signifikan 5 % dengan derajat kebebasan, yaitu $df=(n-k-1)$, dimana n = jumlah observasi, dan k = jumlah variabel. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- a) $H_0 : b_0 = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) $H_1 : b_0 \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk meninterpretasikan hasil dalam uji statistik t berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig. t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, itu berarti variabel independen pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig. t > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, itu berarti variabel independen tidak pengaruh terhadap variabel dependen.

2). Analisis Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau digunakan untuk menguji tentang ada atau tidanya hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Angka koefisien yang dihasilkan dalam uji ini

berguna untuk menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 3.2
Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya Nilai	Tingkat Hubungan
0,00	Tidak Berpengaruh
0,01-0,20	Sangat Lemah
0,21-0,40	Lemah
0,41-0,70	Sedang
0,71-0,90	Kuat
0,91-0,99	Sangat Kuat
1,00	Deterministik

Hasil perhitungan korelasi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi kelompok besar, yaitu:

- a) Korelasi positif kuat, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati +1 atau $= +1$. Artinya, bahwa setiap kenaikan skor nilai pada variabel X akan

diikuti dengan kenaikan skor atau nilai variabel Y. Sebaliknya, apabila variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan penurunan variabel Y.

- b) Korelasi negatif kuat, apabila hasil perhitungan korelasi mendekati -1 atau $= -1$. Artinya, bahwa setiap kenaikan skor nilai pada variabel X akan diikuti dengan penurunan skor atau nilai variabel Y. Sebaliknya, apabila variabel X mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan kenaikan variabel Y.
- c) Tidak ada korelasi, apabila hasil perhitungan korelasi (mendekati 0 atau sama dengan 0). Hal ini berarti bahwa naik turunnya skor atau nilai satu variabel tidak mempunyai kaitannya dengan naik turunnya skor atau nilai variabel yang lainnya. Apabila skor atau nilai variabel X naik tidak selalu

diikuti dengan naik atau turunnya skor atau nilai variabel Y, demikian juga sebaliknya.⁴⁰

3). Uji Koefisien determinasi (*Uji R²*)

Uji R^2 atau uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.⁴¹ Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan nol ($R^2 = 0$), artinya variasi dari variabel Y tidak dapat diterangkan oleh variabel X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari variabel Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel X. Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 -nya.

⁴⁰Agus Irianto, *Statistik Konsep dasar, Aplikasi dan Pengembangannya*, (Jakarta: Kencana, 2004), 141.

⁴¹Iman Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, 96-98.

R^2 didefinisikan atau dirumuskan berdasarkan langkah-langkah sebagaimana yang dilakukan pada tabel ANOVA. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Telah dijelaskan bahwa tidak tepatnya titik-titik pada garis regresi disebabkan karena adanya faktor-faktor lain yang berpengaruh pada variabel bebas. Bila tidak ada penyimpangan tentunya tidak akan ada eror. Bila hal tersebut terjadi, maka $SSE=0$, yaitu berarti $SSR=SST$ atau $R^2 = 1$. Atau dengan kata lain, semua titik observasi berada tepat pada garis regresi. Jadi, SST sesungguhnya variasi dari data, sedangkan SSR adalah variasi dari garis regresi yang dibuat.

D. Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

1. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, input, predictor, dan *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen (terikat).

2. Variabel Dependen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel respon, output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁴²

Pada penelitian ini sesuai dengan judul “Pengaruh Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten 2010-2016”, penelitian dapat mengidentifikasi variabel sebagai berikut:

1. Pendidikan (X)

⁴²Sugiyono, *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 80.

Pendidikan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

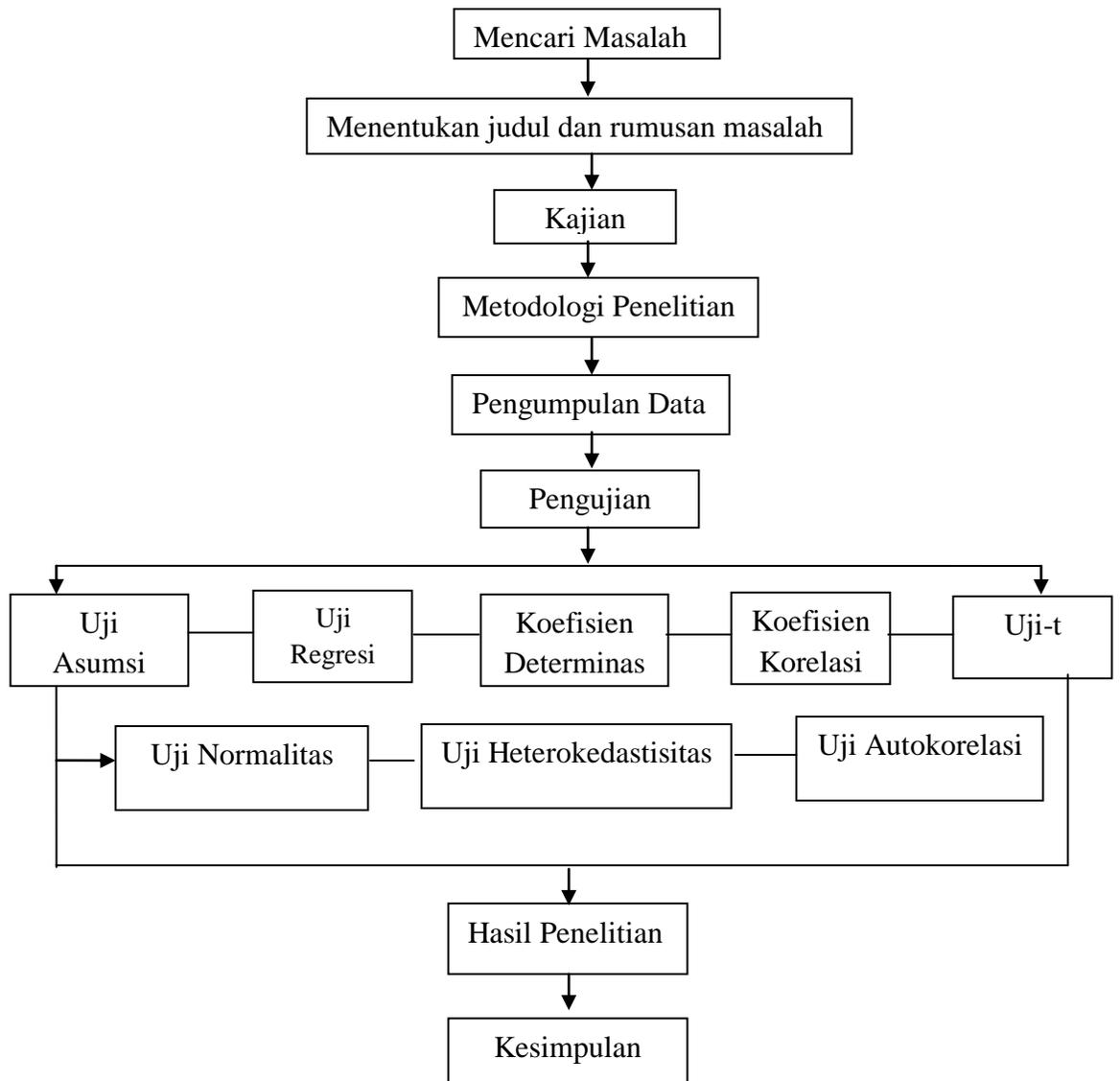
2. Tingkat Kemiskinan (Y)

Salah satu saran pembangunan di suatu daerah adalah menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Banten sebagai variabel Y (terikat)

E. Alur Penelitian

Gambar 3.1

Alur Penelitian



Berdasarkan Gambar 3.1, alur penelitian ini dimulai dari mencari masalah, menentukan judul dan rumusan masalah, kemudian kajian dengan dosen pembimbing akademik dan menentukan metodologi penelitian. Dalam Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten dan mengolahnya menggunakan aplikasi SPSS 16.0. Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis diantaranya uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji t, uji regresi, analisis koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Kemudian disimpulkan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Provinsi Banten

Secara astronomis, Provinsi Banten terletak antara 05007'50" dan 07001' 01" Lintang Selatan, serta 105001'11" dan 106007'12" bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Banten memiliki batasbatas: Utara – Laut Jawa; Selatan - Samudera Hindia; Barat – Selat Sunda; Timur – Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.⁴³

Provinsi Banten terdiri dari empat Kabupaten dan empat Kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

Provinsi Banten secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 200 meter di atas permukaan laut, serta memiliki beberapa gunung dengan ketinggian mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut. Akhir tahun 2015, wilayah

⁴³ Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka 2015*, (Banten: BPS Provinsi Banten, 2016), 3

administrasi Provinsi Banten terdiri dari empat wilayah kabupaten dan empat kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 Tahun 2008 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²).

Wilayah Provinsi Banten bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda.⁴⁴

2. Tingkat Kemiskinan Provinsi Banten

Tingkat kemiskinan Banten cukup rendah apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada September 2016, tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tercatat sebesar 5,36 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 657,74 ribu orang. Secara nasional, tingkat kemiskinan Banten berada pada

⁴⁴Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka 2015*, (Banten: BPS Provinsi Banten, 2016), 3-5.

posisi terendah keenam setelah DKI Jakarta (3,75%), Bali (4,15%), Kalimantan Selatan (4,52%), Bangka Belitung (5,04%) dan Kalimantan Tengah (5,36%).

Namun, bila dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, tingkat kemiskinannya masih sangat tinggi terutama di kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak berada dikisaran angka 10 %.

Tabel. 4.1

Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2016 (persen)

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata Rata
Pandeglang	11.14	9.80	9.28	10.25	9.50	10.43	9.67	10.01
Lebak	10.38	9.20	8.63	9.50	9.17	9.97	8.71	9.37
Tangerang	7.18	6.42	5.71	5.78	5.26	5.71	5.29	5.90
Serang	6.34	5.63	5.28	5.02	4.87	5.09	4.58	5.26
Kota Tangerang	6.88	6.14	5.56	5.26	4.91	5.04	4.94	5.53
Kota Cilegon	4.46	3.98	3.82	3.99	3.81	4.10	3.57	3.91
Kota Serang	7.03	6.25	5.70	5.92	5.70	6.28	5.58	6.06
Kota TangSel	1.67	1.50	1.33	1.75	1.68	1.69	1.67	1.61

Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan Tabel 4.1, Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten 2010-2016 mengalami penurunan, walaupun tidak merata di kabupaten/kota di provinsi Banten. Tingkat

kemiskinan di Banten merupakan tingkat kemiskinan agregat dari 8 kabupaten/kota di Banten. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di 8 kabupaten/kota di Banten masih tidak merata, dan sebagian tingkat kemiskinannya masih tinggi. Perbedaan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Banten periode 2010-2016 cukup mencolok, misalnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (10 persen) memiliki tingkat kemiskinan sangat tinggi dibandingkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki tingkat kemiskinan sangat rendah (1.61 persen) rangenya kurang lebih 8 persen. Ini mengindikasikan usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan belum merata ke seluruh kabupaten/kota.

3. Pendidikan Provinsi Banten

Pendidikan merupakan sebuah pionir dalam berkembangnya pembangunan suatu bangsa sehingga menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika dunia pendidikan dalam suatu bangsa tidak baik, maka pembangunan bangsa tersebut tidak akan berkembang dengan baik.

Tabel 4.2

**Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2010-2016 (Tahun)**

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDG	6.33	6.38	6.43	6.44	6.45	6.60	6.62
LBK	5.34	5.58	5.70	5.81	5.84	5.86	6.19
TGR	7.85	7.96	8.07	8.18	8.20	8.22	8.23
SRG	6.07	6.31	6.75	6.65	6.69	6.90	6.98
Kot. TGR	9.64	9.75	9.76	9.82	10.20	10.20	10.28
Kot. Cilegon	8.71	8.93	9.29	9.60	9.66	9.67	9.68
Kot. Serang	8.32	8.39	8.48	8.56	8.58	8.59	8.60
Kot. TangSel	10.15	10.87	11.9	11.48	11.56	11.57	11.58

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan Tabel 1.3, Rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten Tahun 2010-2016 mengalami sedikit peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, jika dilihat dimasing-masing daerah terdapat perbedaan yang signifikan, dimana Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang memiliki rata-rata lama sekolah rendah bila dibandingkan kabupaten/kota di provinsi Banten. Hal ini mengindikasikan usaha pemerintah dalam meningkatkan rata-rata lama sekola belum merata ke seluruh kabupaten/kota.

Tabel 4.3**Persentase Pendidikan Yang Ditamatkan di Provinsi Banten
Tahun 2010-2016**

Tahun	<SD	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA	PT
2010	22.25	29.46	18.92	22.66	6.69
2011	20.80	28.60	19.65	23.88	7.09
2012	20.49	26.89	20.09	25.46	7.06
2013	20.97	28.03	19.57	24.94	6.50
2014	23.08	26.14	18.68	24.61	7.49
2015	17.68	28.95	19.80	26.01	7.56
2016	16.17	32.99	16.12	20.09	8.07
Rata-rata	20.21	28.72	18.96	23.95	7.20

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan tabel 4.3, mayoritas pendidikan penduduk Banten tahun 2010-2016 tamatan SD/MI dengan persentase Rata-rata 28.72%, SMA/MA 23.95%, <SD 20.21, SMP/MTs 18.96 dan PT (Perguruan Tinggi) 7.20%.

B. Deskripsi Data

Penelitian ini secara keseluruhan menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel Y dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) sebagai variabel X.

Tabel 4.4
Data Penelitian

Kab/Kota	Tahun	Pendidikan (tahun)	Tingkat Kemiskinan (persen)
Kab. Pandeglang	2010	6.33	11.14
	2011	6.38	9.80
	2012	6.43	9.28
	2013	6.44	10.25
	2014	6.45	9.50
	2015	6.60	10.43
	2016	6.62	9.67
kab. Lebak	2010	5.34	10.38
	2011	5.58	9.20
	2012	5.70	8.63
	2013	5.81	9.50
	2014	5.84	9.17
	2015	5.86	9.97
	2016	6.19	8.71
Kab. Tangerang	2010	7.85	7.18
	2011	7.96	6.42
	2012	8.07	5.71
	2013	8.18	5.78
	2014	8.20	5.26
	2015	8.22	5.71
	2016	8.23	5.29
Kab. Serang	2010	6.07	6.34
	2011	6.31	5.63
	2012	6.75	5.28

	2013	6.65	5.02
	2014	6.69	4.87
	2015	6.90	5.09
	2016	6.98	4.58
Kota Tangerang	2010	9.64	6.88
	2011	9.75	6.14
	2012	9.76	5.56
	2013	9.82	5.26
	2014	10.20	4.91
	2015	10.20	5.04
	2016	10.28	4.94
Kota Cilegon	2010	8.71	4.46
	2011	8.93	3.98
	2012	9.29	3.82
	2013	9.60	3.99
	2014	9.66	3.81
	2015	9.67	4.10
	2016	9.68	3.57
Kota Serang	2010	8.32	7.03
	2011	8.39	6.25
	2012	8.48	5.70
	2013	8.56	5.92
	2014	8.58	5.70
	2015	8.59	6.28
	2016	8.60	5.58
Kota TangSel	2010	10.15	1.67
	2011	10.87	1.50
	2012	11.9	1.33
	2013	11.48	1.75
	2014	11.56	1.68
	2015	11.57	1.69
	2016	11.58	1.67

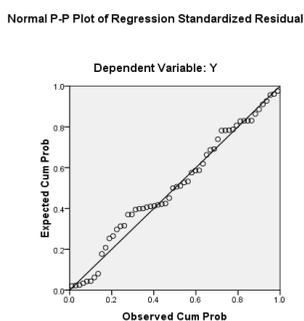
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.⁴⁵ Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menghubungkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berdasarkan pengujian uji normalitas dengan SPSS didapatkan *output* sebagai berikut:



Gambar 4.1
Uji Normalitas

⁴⁵Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), 154.

Berdasarkan Gambar 4.4 di atas, menunjukkan bahwa sebaran data pada penelitian memiliki penyebaran dan berdistribusi normal. Karena titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.

Untuk menegaskan hasil uji normalitas diatas maka peneliti melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		56
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.99086739
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.065
	Negative	-.101
Kolmogorov-Smirnov Z		.759
Asymp. Sig. (2-tailed)		.612

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, Hasil uji normalitas ini dapat dilihat pada tabel di atas nilai Kolmogorov-Smirnov 0,759 dengan probabilitas signifikansi 0,612 lebih besar dari $\alpha=0.05$, berarti data berdistribusi secara normal, dengan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, seperti uji grafik, uji *Park*, uji *Glajser*, uji *Spearman's*, *Rank Correlation*, dan uji *Lagrang Multiplier (LM)*.

Dalam penelitian ini, akan mengatasi ada atau tidaknya heteroskedastis dengan melakukan uji *Park*.

Berikut ini akan disajikan hasil tabel uji heteroskedastis yang diolah menggunakan SPSS 16:

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.176	3.611		.880	.383
LN _X	-1.919	1.721	-.150	-1.115	.270

a. Dependent Variable: LNEI2

Hasil output uji *Park* di atas, terlihat pada tabel uji t, nilai signifikansinya yaitu 0,270 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi pelanggaran terhadap heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan

satu sama yang lainnya. Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Durbin Watson* (DW Test).

Berikut ini akan disajikan hasil tabel uji autokorelasi yang diolah menggunakan SPSS 16:

Tabel 4.7

Uji Autokorelasi

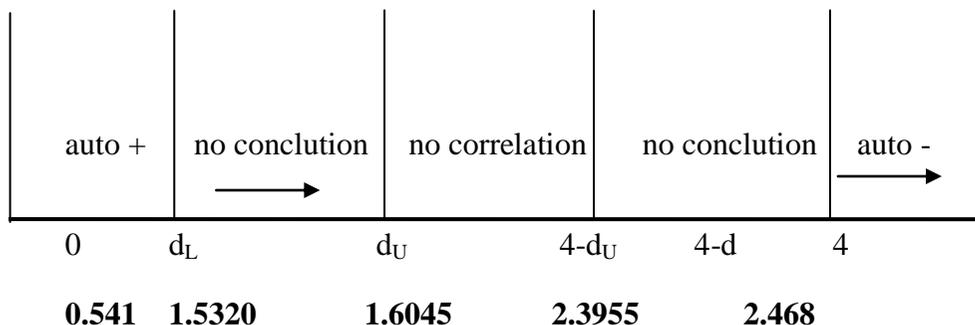
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.834 ^a	.696	.690	1.45544	.541

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

rdasarkan tabel 4.7, nilai Durwin-Watson yang didapat adalah 0.541, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 56 (n) dan jumlah variabel bebasnya 1 (K). Jadi didapat nilai d_L dan d_U masing-masing 1.5320 dan 1.6045.



Gambar 4. 2

Uji Autokorelasi

Nilai DW 0.541 lebih besar dari 0 dan lebih besar dari d_L atau $0 < d < d_L$, maka dapat disimpulkan bahwa adanya autokorelasi positif dengan keputusan tolak H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi.

Berdasarkan kesimpulan di atas yang menyatakan bahwa adanya masalah korelasi. Ghazli (2012), menjelaskan beberapa opsi penyelesaian masalah autokorelasi pada sebuah model regresi, yakni dengan cara merubah model regresi kedalam *Semi-Log* dan *Double-Log*. Model regresi *semi-log* adalah merubah persamaan variabel dependen menjadi logaritma natural (Ln) kemudian persamaan variabel

independen tetap, atau sebaliknya semua variabel independen diubah menjadi logaritma natural dan variabel dependen tetap. Sedangkan metode regresi *double-log* adalah merubah seluruh variabel kedalam bentuk logaritma natural (Ln). Selain itu, berdasarkan beberapa literatur terkait, jika hal tersebut belum dapat mengakomodasi masalah autokorelasi, maka dapat melalui cara transformasi.

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

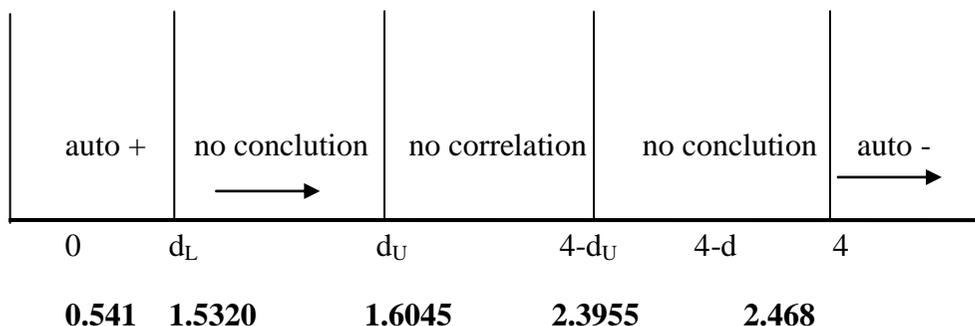
Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.573 ^a	.328	.315	.92022	1.896

a. Predictors: (Constant), LAGX

b. Dependent Variable: LAGY

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, nilai Durbin-Watson yang didapat sebesar 1.896, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan signifikansi 5 %, jumlah sampel 56 (n) dan jumlah variabel bebasnya 1

(K). Jadi didapat nilai d_L dan d_U masing-masing 1.5320 dan 1.604



Gambar 4.3

Uji Autokorelasi (Lag)

Berdasarkan gambar 4.3, nilai Durbin-Watson lebih besar dari d_U dan lebih kecil dari $4-d_U$ atau $d_U < d < 4-d_U$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dengan keputusan terima H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi.

2. Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4.9
Uji Analisis Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.722	.420		8.872	.000
	LAGX	-.781	.153	-.573	-5.088	.000

a. Dependent Variable: LAGY

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 16 untuk variabel X dan variabel Y didapat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$\text{LagY} = a + b \text{LagX} + e$$

$$\text{LagY} = 3.722 + (-0.781) \text{Lag X} + e$$

Interpretasinya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 3.722 menyatakan bahwa, ketika rata-rata lama sekolah (pendidikan) sama dengan 0 maka tingkat kemiskinan sebesar 3,722 persen.
- b. Koefisien regresi variabel X sebesar -0.781 menyatakan bahwa kenaikan 1 tahun rata-rata lama sekolah

(pendidikan) akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,781 persen.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel yang lain itu konstan.⁴⁶

Tabel 4.10

Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.722	.420		8.872	.000
LAGX	-.781	.153	-.573	-5.088	.000

a. Dependent Variable: LAGY

⁴⁶Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 21, 154.

Berdasarkan table 4.10, terlihat t_{hitung} sebesar -5.088 atau 5,088 dan t_{tabel} dengan menggunakan uji dua pihak dengan tingkat signifikan $\alpha=5\%$ $df (n-k-1) = (56-1-1) = 54$, maka besar $t_{tabel} 2.005$. Jadi, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.088 > 2.005$) dan tingkat signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa pendidikan mempunyai pengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten.

b. Analisis Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau digunakan untuk menguji tentang ada atau tidaknya hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Angka koefisien yang dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut ini akan disajikan hasil tabel koefisien korelasi yang diolah menggunakan SPSS 16:

Tabel 4.11
Uji Analisis Koefisien Korelasi

Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.573 ^a	.328	.315	.92022	1.896

a. Predictors: (Constant), LAGX

b. Dependent Variable: LAGY

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.573 yang terletak pada interval 0.41-0.70 yang berarti tingkat hubungan antara pendidikan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten adalah sedang.

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 . Berikut ini akan disajikan hasil tabel koefisien determinasi yang diolah menggunakan SPSS

16:

Tabel 4.12
Uji R²

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.573 ^a	.328	.315	.92022	1.896

a. Predictors: (Constant), LAGX

b. Dependent Variable: LAGY

Besarnya nilai koefisien determinasi (R²) bisa dilihat dari nilai R *Square* yaitu sebesar 0.328. Hal ini berarti bahwa variabel pendidikan dapat dijelaskan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan sebesar 32.8%. Adapun sisanya 67.92% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

d. Analisis Ekonomi

Hasil penelitian tentang pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan berpengaruh positif signifikan. Hasil penelitian ini mendukung teori *Human Capital* yang diungkapkan oleh Lucas dan Romer adalah suatu teori yang didalamnya dijelaskan akan pentingnya pendidikan (*Human Capital*) terhadap tingkat

pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara.

Pendidikan (*Human Capital*) berkaitan dengan sumber daya manusia. Seseorang yang pendidikannya tinggi memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga dapat hidup mandiri, dari kemandiriannya tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Tinggi rendahnya pendidikan di suatu daerah akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Sehingga, jika lama pendidikan mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan tersebut akan mengalami penurunan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Kesimpulannya sebagai berikut:

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel pendidikan (X) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Provinsi Banten tahun 2010-2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. 0.000 lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.088 > 2.005$) dan tingkat signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05.
2. Pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2010-2016 sebesar 32.8%. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.328, angka tersebut berarti bahwa pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan 32.8%. Sedangkan sisanya sisanya 67.92% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini. Berdasarkan hasil perhitungan yang didapat dari pengujian korelasi diperoleh nilai sebesar 0.573 yang terletak pada interval 0.41-0.70 yang berarti tingkat hubungan antara pendidikan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten adalah sedang.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Provinsi Banten

Karena tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh pendidikan, maka hendaknya pemerintah Provinsi Banten lebih mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas pendidikannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan faktor-faktor lainnya yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan, sebab kemiskinan tidak saja dipengaruhi oleh pendidikan. Faktor lain yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan diantaranya pengangguran, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung:

Alfabeta, 2010

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*,

(Jakarta: Departemen Agama, 2008).

Dewantara, Awan Setya, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*,

Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Jamasy, Owin, *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan*

Kemiskinan, Jakarta: Belantika, 2004.

Julianita, Haryadi Winda, *SPSS Vs LISREL: Sebuah Pengantar*,

Aplikasi Untuk Riset, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 90.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT. Sinergi

Pustaka Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan*

Kebijakan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997.

- Mudrajad, Kuncoro, *Ekonomika Indonesia Edisi Pertama*, (Yogyakarta: Penerbit UUP STIM YKPN, 2009), 135.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Geme Insani Press, 1995.
- Soelaeman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar-Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2000.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suliyanto, *Ekonometrika Terapan-Teori dan Aplikasi dengan SPSS*, Yogyakarta: CV. Andi, 2011.
- Sumodiningrat, Gunawan, dkk, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: IMPAC, 1999.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1996.
- Supangat, Andi, *STATISTIKA: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametik*, Jakarta: KENCANA, 2007.
- Suyanto, Bagong, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*, Malang: In-Trans Publising, 2013.

Swasono, Sri-Edi, dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, Jakarta: UI Press, 1999.

Todaro, Michael P, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2000.

UNDP, *Human Development Report*, (New York: Oxford University Press, 1995), 177.

Wahid, Nusron, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta: KPG, 2014

Zianuddin, Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.

JURNAL DAN SKRIPSI

Dama, Himawan Yudistira, Dkk, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014),” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 3 (2016).

Dwi Puspa Hambarsari dan Kunto Inggit, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2004-

2014”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Vol. 1, No. 2, (September, 2016)

Endrayani Ni Ketut Eni, Made Heny Urmila Dewi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. V, No. 1 (2016).

Fitri Amelia, “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesian (KTI) Periode 2001-2010,” *EconoSains*, Vol. X, No. 2, (Agustus, 2012), 161.

Niswati, Khurri, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011,” *Eko-Regional*, Vol. IX, No. 2 (September 2014).

Puspita, Dita Wahyu, “Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah,” *JEJAK: Jurnal Economics and Policy*, Vol. VIII, No. 1 (2015).

Rusdarti & Lesta Karolina Sebayang, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah,” *Jurnal Economia*, Vol. IX, No. 1, (April 2013).

Sari, Novi Astika, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Periode 1999-2003,” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. V, No. 12 (Desember 2016).

Seran, Sirilius “Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi, “ *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 10, No. 2 (Februari 2017).

WEBSITE

<https://fuadinotkamal.wordpress.com/2009/05/13/pendidikan-dan-kemiskinan/>, diakses tanggal 17 November 2017.

<http://www.spengetahuan.com/2015/02/15-pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 17 November 2017.

www.banten.bps.go.id